Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis Sebagai Penjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Data Pasien

Analysis Of Medical Record Information Disclosure as Guarantee of Legal Aspects of Confidentiality of Patient Data

Ahmad Darmawan[1], Rahil Salsabilah[2], Hani Sulistiowati[3], Risma Nur Sukmawati[4], Diah Wijayanti Sutha[5], Lilis Masyfufah[6]

[1,2,3,4,5,6]Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo

*e-mail korespondensi: [1]ahmaddarmawan867@gmail.com

Abstrak

Setiap sarana kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi kesehatan yang terdapat di dalam rekam medis terhadap kemungkinan rusak, hilang, pemalsuan isi berkas rekam medis juga sebagai sarana pelepasan menjamin aspek hukum atas kerahasiaan data pasien. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi pasien pada saat proses pelepasan berkas rekam medis menjadi hal yang sangat penting guna untuk memudahkan akses informasi tuntutan hukum pihak pelayanan kesehatan dan praktisi kesehatan, serta pihak ke-3 yang berwenang. Tujuan dari penelitian ini adalah gambaran mengenai pelepasan informasi rekam medis dalam aspek hukum kerahasiaan. Adapun hal-hal yang dilihat dalam penelitian ini adalah mengenai prosedur pelepasan informasi medis, persyaratan pelepasan informasi medis, pihak-pihak yang ikut terlibat dalam pelepasan informasi medis, serta informasi penggunaan pelepasan informasi medis dan melihat aspek keamanan dari proses pelepasan informasi medis. Jenis penelitian yang dilakukan adalah literatur review. Hasil penelitian yang dilakukan adalah terdapat 2 jurnal yang melakukan prosedur pelepasan berkas rekam medis sesuai SOP (Standart Operasional Prosedur) yang ada, 1 jurnal tidak menerapkan prosedur pelepasan dengan tepat dan tidak memiliki SOP (Standart Operasional Prosedur) dan dari 10 jurnal yang digunakan sebagai referensi ditemukan faktor penghambat pemenuhan pelepasan informasi yang dibedakan menjadi 3 faktor yaitu man, material, method. Berdasarkan hasil literatur review dari jurnal yang didapat dapat disimpulkan yaitu ketidak tepatan SOP (Standart Operasional Prosedur) pada pelepasan informasi yang dapat mengakibatkan masalah terkait kerahasiaan informasi data pasien belum adanya SOP (Standart Operasional Prosedur).

Kata kunci: Pelepasan berkas rekam medis, aspek hukum, kerahasiaaan pasien

Abstract

Each health facility is responsible for protecting the health information contained in the medical record against the possibility of damage, loss, falsification of the contents of the medical record file as well as a means of releasing to ensure the legal aspects of the confidentiality of patient data. Maintaining the security and confidentiality of patient information during the process of releasing medical record files is very important in order to facilitate access to information on lawsuits from health services and health practitioners, as well as authorized third parties. The purpose of this study is to describe the release of medical record information in the legal aspect of confidentiality. The things that are seen in this research are the procedures for releasing medical information, the requirements for releasing medical information, the parties involved in releasing medical information, as well as information on the use of releasing medical information and seeing the security aspects of the process of releasing medical information. The type of research conducted is literature review. The results of the research conducted are that there are 2 journals that carry out the procedure for releasing medical record files according to the existing SOP (Standard Operating Procedure), 1 journal does not apply the release procedure properly and does not have SOP (Standard Operating Procedure) and of 10 journals that are used as references found inhibiting factors for the fulfillment of the release of information which is divided into 3 factors, namely man, material, method. Based on the results of the literature review from the journal obtained, it can be concluded that the SOP (Standard Operational Procedure) is inappropriate in the release of information which can lead to problems related to the confidentiality of patient data information, there is no SOP (Standard Operating Procedure).

Keywords: Release of medical record files, legal aspects, patient confidentiality.

PENDAHULUAN

Informasi medis adalah catatan didalam berkas rekam medis pasien, dapat digunakan sebagai dasar pembiayaan, administrasi, dokumentasi, hukum, dan sebagainya, pemanfaatan rekam medis sangat erat hubungannya dengan kegiatan pelepasan informasi medis. Pelepasan informasi medis itu sendiri adalah kegiatan permintaan data yang terkandung didalam berkas rekam medis untuk dimanfaatkan terhadap kepentingan tertentu, baik yang dilakukan oleh pasien sendiri, keluarga pasien, tenaga kesehatan, maupun pihak-pihak tertentu yang diperbolehkan untuk mendapatkannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelepasan informasi medis pasien secara sederhana dapat diartikan juga sebagai adanya suatu kegiatan pembukaan atas rahasia medis pasien (Narendra et al., 2020). Proses pelepasan informasi harus dilakukan berdasarkan SOP rumah sakit yang digunakan dirumah sakit, SOP merupakan instruksi yang berisikan langkah-langkah suatu proses kerja rutin tertentu yang disusun berdasarkan konsensus bersama yang dibuat oleh fasilitas layanan kesehatan berdasarkan standar profesi (Purba & Sidabutar, 2021).

Pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan dirumah sakit mempunyai hak atas kerahasiaan informasi medisnya sebagaimana diatur pada pasal 32 huruf (i) undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit yang menyatakan bahwa pasien mempunyai hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya (Narendra et al., 2020). Hal tersebut sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan (UU RI No. 36, 2009).

Pelepasan informasi merupakan permasalahan yang masih terjadi diberbagai institusi pelayanan kesehatan persoalan yang sering terjadi pada pelepasan informasi medis yaitu kurang adanya pemenuhan aspek hukum kerahasiaan data pasien. Hal ini didukung oleh (Narendra et al., 2020) bahwa, pemenuhan aspek hukum kerahasiaan dalam penyelenggaraan pelepasan informasi seringkali terabaikan dan cenderung kurang mendapatkan perhatian secara khusus didalam pelayanan kesehatan. Kurang terlindunginya kerahasiaan informasi medis pasien dapat menimbulkan terjadinya sengketa medis antar para pihak didalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dari review jurnal yang diteliti ditemukan total permintaan pelepasan informasi 888 (100%) dengan 617 (69%) permintaan tidak sesuai SOP dan 271 (31%) sesuai SOP, serta ditemukan adanya ketidaklengkapan berkas rekam medis, kurangnya pemahaman petugas terhadap prosedur pelepasan informasi, tidak adanya SOP baik kepada pasien atau pihak ketiga menjadi faktor penyebab pelepasan dalam pemenuhan aspek hukum kerahasiaan data pasien.

Kurang adanya pemenuhan aspek hukum kerahasiaan data pasien yang berhubungan dengan pelepsan informasi akan menimbulkan permsalahan yang terjadi antara pasien dan rumah sakit. Hal tersebut merupakan permasalahan yang dapat merugikan institusi pelayanan kesehatan oleh sebab itu penulis melakukan penelitian secara *literatur review* dengan mengambil judul "Analisis Pelepasan Informasi Sebagai Penjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Data Pasien".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain *literatur review* dengan pencarian jurnal dari database google scholar. Kriteria inklusi untuk menilai jurnal yang dipilih dengan rentang waktu publikasi 7 tahun dari 2016 sampai 2022. Subjek penelitian yaitu berkas rekam medis. Tempat penelitian yaitu pelayanan kesehatan.

HASIL

Berdasarkan jurnal yang didapat, penulis melakukan perhitungan presentase banyaknya penyebab pemenuhan pelepasan informasi medis sebagai penjamin aspek hukum kerahasiaan data pasien berdasrkan *man, material,* dan *methode.*

Tabel 1. Presentase Review Jurnal

No	Faktor	Subjek Penelitian	Jml	Presentase
1	*Man*	Pelatihan	3	18%
		Pendidikan	1	6%
		Pengetahuan	1	6%
		Beban kerja	1	6%
2	*Material*	Berkas Rekam Medis Tidak Lengkap	1	6%
		Formulir Pelepasan Informasi	3	18%
		Buku Ekspedisi	1	6%

3	*Methode*	Tidak ada SOP	5	31%
Jumlah			16	97%

Pada tabel 1 ditemukan penyebab pemenuhan pelepasan informasi sebagai penjamin aspek hukum kerahasiaan data pasien pada *man* yaitu pelatihan, pendidikan, pengetahuan, dan beban kerja dengan total presentase 36%. Pada *material* ditemukan 3 penyebab yaitu berkas rekam medis tidak lengkap, formular pelepasan informasi tidak lengkap, dan penggunaan buku ekspedisi yangn tidak maksimal dengan total presentase 30%, *methode* terdiri dari suatu penyebab yaitu tidak adanya penggunaan SOP khusus untuk pelepasan informasi dengan total 31%.

PEMBAHASAN

Identifikasi Prosedur Pelepasan Informasi Sebagai Penjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Data Pasien

Berdasarkan jurnal yang digunakan sebagai referensi penulis menemukan beberapa hasil mengenai prosedur pelepsan informasi medis antara lain:

1. Adanya prosedur yang mengatur dan menjamin aspek hukum kerahasiaan pelepsan informasi medis terhadap permintaan resume dan visum medis, namun masih ada yang belum sesuai dengan SOP yang ada. Ketidaksesuaian standar prosedur pelepasan informasi dikhawatirkan adanya ketidak tepatan terkait masalah kerahasiaan informasi data pasien
2. Belum adanya SOP khusus untuk pelepasan informasi medis baik kepada pihak asuransi BPJS atau pihak yang terlibat, namunpelepsan informasi medis menggunakan bentuk regulasi yang ada di masing-masing rumah sakit. Dampak dari tidak adanya SOP yang mengatur tentng pelepasan informasi medis akan mempengaruhi kinerja tenaga kesehatan terhadap kepentingan klaim asuransi, serta berdampak terhadap proses pencairan klaim yang diajukan menjadi lambat sehingga merugikan pihak pasien.
3. Adanya SOP yang digunakan sebagai prosedur pelepasan informasi medis baik kepada pasien maupun pihak ketiga serta dilaksanakan dengan sesuai. Dengan adanya SOP tersebut dapat menyelesaikan proses kerja rutin dengan memebrikan Langkah-langkah yang baik dan benar.

Identifikasi Faktor Penghambat Pemenuhan Pelepasan Aspek Hukum Kerahasiaan Data Pasien Berdasarkan *Man, Material,* Dan *Methode*

Dari refrensi jurnal yang digunakan ditemukan 8 faktor penghambat pemenuhan pelepasan informasi sebagai penjamin aspek hukum dengan total presentase 97%. Dibedakan menjadi 3 faktor yaitu, *man, material, methode* dengan memiliki masing-masing penyebab penghambat pemenuhan pelepasan informasi medis. Faktor *man* merupakan dampak pertama yang mempengaruhi pemenuhan pelepasan informasi medis, sebab ditemukan penjelasan dari (Narendra et al., 2020) bahwa, perbedaan penafsiran yang berbeda-beda berdampak pada terhambatnya proses pencairan klaim yang diajukan sehingga dapat merugikan bagi pasien. Selain itu kurangnya pengetahuan petugas tentang prosedur pelepasan informasi pasien juga dapat menyebabkan peluang adanya pemalsuan dan rentan jatuhnya informasi ketangan yang tidak bertanggung jawab (Warijan et al., 2019). Pendidikan yang tidak sesuai dengan standar profesi D3 dan D4 juga menyebabkan besarnya pelepasan informasi pasien, dijelaskan oleh penelitian (Parulian Gultom & Anggraini, 2019) bahwa petugas dengan rata-rata pelepasan informasi pasien tertinggi yang tidak sesuai dengan prosedur disebabkan oleh petugas yang berpendidikan tidak sesuai standar profesi perekam medis. Penyebab beban kerja yang terlalu banyak dan tidak sesuai kapasitas petugas menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pelepasan informasi, oleh karena itu perlu pengaturan ulang *job description* agar dapat melaksanakan SOP dengan benar (Mu et al., 2020).

Faktor kedua yaitu *material* pengisian berkas rekam medis yang tidak lengkap merupakan penghambat pertama pada pelepasan informasi pasien, banyaknya pengisian berkas rekam medis yang tidak lengkap mengindikasi belum optimalnya pemenuhan aspek hukum kerahasiaan rekam medis (Narendra et al., 2020). Formulir pelepasan informasi digunakan sebagai salah satu prosedur pemenuhan pelepasan informasi sebagai penjamin kerahasiaan data pasien. Formulir pelepasan diisi oleh petugas dengan meminjam KTP/KK yang digunakan untuk mengisi data diri pasien, namun penelitian terdahulu mengatakan bahwa terdapat petugas yang berulangkali mengisi

tanpa meminjam KTP/KK sebagai panduan pengisian data diri pasien, hal tersebut mempengaruhi kelengkapan formulir pelepasan informasi sebab KTP/KK digunakan sebagai persayaratan pendukung yang diperlukan rumah sakit sebagai arsip pelepasan informasi medis (Faida, 2016). Hal tersebut juga selaras dengan (Tho & Purnama, 2020) yang mengatakan bahwa dibeberapa kasus pengajuan pelepasan informasi tidak memenuhi persyaratan seperti tidak adanya surat pengantar, Kartu Keluarga (KK) dan surat pernyataan pernah dirawat. Hal ini dikarenakan kurangya informasi antara petugas dan pihak yang mengajukan pelepsan informasi. Buku ekspedisi digunakan sebagai *tract record* atau arsip keluar masuk berkas rekam medis, peminjaman atau pelepasan rekam medis harus tercatat dalam buku ekspedisi sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pembocoran informasi pasien oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan buku ekspedisi yang kurang optimal menyebabkan tidak terlacaknya berkas rekam medis pasien, yang dapat berakibat pada hukum kerahasiaan data pasien, sebab petugas yang lupa mengisi buku ekspedisi maka dapat menyebabkan tidak terlacaknya berkas rekam medis pasien di rak penyimpanan (Istikomah et al., 2020)

Methode merupakan faktor ketiga yang menjadi penghambat pelepasan informasi pasien, 50% jurnal yang diteliti sepakat mengatakan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak dipergunakan dengan baik bahkan beberapa rumah sakit tidak memiliki SOP khusus untuk pelepasan informasi pasien kepada pihak ketiga. Proses pelepasan informasi medis harus dilakukan berdasarkan SOP yang digunakan di rumah sakit, prosedur pelepasan informasi medis sangat berguna dalam mempercepat proses pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga dengan terjaminnya kerahasiaan data pasien (Novitasari et al., 2018)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil literature review dari jurnal yang dapat disimpulkan yaitu ketidaktepatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada pelepasan informasi yang bisa mengakibatkan masalah terkait kerahasiaan informasi data pasien, belum adanya SOP khusus untuk pelepasan informasi medis baik kepada pihak asuransi atau pihak yang terlibat lainnya yang akan berdampak terhadap kepentingan klain asuransi dan proses pencairan klaim yang merugikan pihak pasien.

Dari 10 refrensi jurnal yang digunakan ditemukan faktor penghambat pemenuhan pelepasan informasi yang di bedakan menjadi tiga faktor yaitu *man, material, method.* Yang pertama faktor *man* yaitu kurangnya pengetahuan petugas tentang prosedur pelepasan informasi pasien yang akan menyebabkan adanya pemalsuan dan rentan jatuhnya informasi ketangan yang tidak bertanggung jawab. Faktor *material* yaitu banyaknya pengisian berkas rekam medis yang tidak lengkap hal ini dikarenakan kurangya informasi antara petugas dan pihak yang mengajukan pelepsan informasi. Yang terakhir yaitu faktor *methode* pada penghambat pelepasan informasi pasien bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak dilakukan dengan baik dan beberapa rumah sakit tidak memiliki SOP untuk pelepasan pihak ketiga yang bisa mengakibatkan tidak terjaminya data kerahasiaan pasien.

DAFTAR RUJUKAN

Faida, E. W. (2016). Evaluasi Prosedur Pelepasan Informasi Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Onkologi Surabaya. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, *4*(1), 46–51. https://doi.org/10.33560/.v4i2.131

Istikomah, F. A., Erawantini, F., & Putra, D. S. H. (2020). Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Berdasarkan Aspek Hukum Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis untuk Pendidikan di RSUD Sleman. *J-REMI : Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan*, *1*(4), 393–399. https://doi.org/10.25047/j-remi.v1i4.2169

Mu, I., Masyfufah, L., Rosarini, A., & Rumiati, Y. (2020). *FAKTOR KEPATUHAN PELAKSANAAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PELEPASAN INFORMASI MEDIS DI RUMAH SAKIT DELTA SURYA SIDOARJO Factors Of Compliance With The Implementation Of Operational Procedures (SPO) Medical Information Release In Delta Surya Sido*. *6*(1), 1–10.

Narendra, I., Dewi, H. I. R., & Ismiyati. (2020). *Pemenuhan Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Pada Proses Pelepasan Informasi Medis di Rumah Sakit XY Sleman Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta PENDAHULUAN Rumah sakit merupakan salah satu*

fasilitas pelayanan kesehatan yang berwenang u. *2*(2), 27–34.

Novitasari, D., Sureni, I., & Rosita, A. (2018). Tinjauan Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Untuk Keperluan Klaim Bpjs Di Rsu Darmayu Ponorogo. *Global Health Science (Ghs ……*, *3*(3), 175–180. http://jurnal.csdforum.com/index.php/GHS/article/view/247

Parulian Gultom, S., & Anggraini, S. (2019). Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Ketiga Di Rumah Sakit Mitra Medika. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI)*, *3*(1), 425–430. https://doi.org/10.52943/jipiki.v3i1.58

Purba, E., & Sidabutar, H. A. (2021). Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Ketiga Di RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI)*, *6*(2), 183–188. https://doi.org/10.52943/jipiki.v6i2.480

Tho, I. La, & Purnama, F. (2020). *Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis Di RSU Kota Tangerang Selatan*. 7–16. https://www.publikasi.aptirmik.or.id/index.php/procbandung/article/view/38

UU RI No. 36. (2009). UU RI No. 36 Tahun 2009. *UU RI Tentang Kesehatan*. https://doi.org/10.1038/132817a0

Warijan, W., Widodo, W., & Nur'afifah, M. M. (2019). Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis. *Jurnal Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan*, *2*(1), 20. https://doi.org/10.31983/jrmik.v2i1.4398